

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

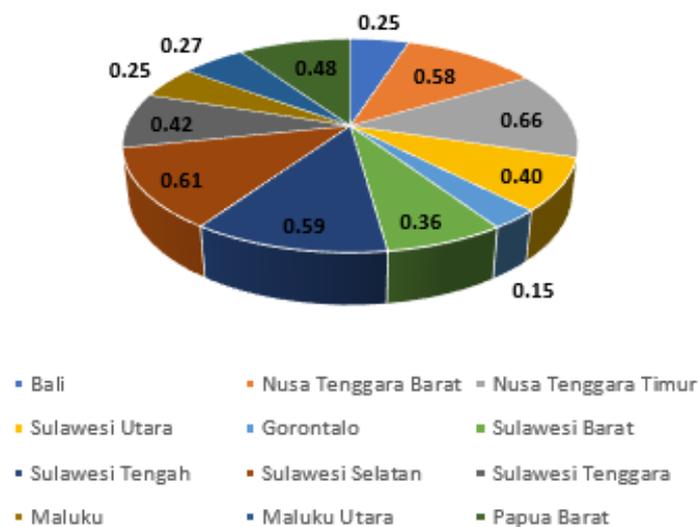
Kenaikan pendapatan riil perkapita jangka panjang merupakan suatu proses dalam pembangunan ekonomi, dengan syarat garis kemiskinan mutlak tidak naik dan tidak ada ketimpangan distribusi pendapatan (Gemmel, 1992, p.195). Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses perbaikan terhadap kesejahteraan material dalam jangka panjang dan terus menerus serta lancarnya distribusi barang dan jasa (Jhingan, 2010a, p.7). Pembangunan ekonomi bertujuan dalam rangka mensejahterakan masyarakat. Kesejahteraan dalam pembangunan dapat dinilai dan diukur dengan pendekatan ekonomi maupun nonekonomi. Pendekatan ekonomi yang menjadi ukuran adalah kenaikan pendapatan nasional. Kenaikan pendapatan nasional apabila disertai dengan pertumbuhan penduduk yang cepat tidak termasuk dalam pembangunan ekonomi. Produk domestik regional bruto (PDRB) yang digunakan dalam perhitungan laju pertumbuhan ekonomi dapat menjadi acuan dalam proses pembangunan. Kondisi ekonomi pada suatu negara atau wilayah dapat terlihat dari PDRB wilayah yang berada di negara tersebut. Pembangunan ekonomi biasanya diikuti dengan tingginya pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi harus disertai dengan pemerataan agar tidak adanya ketimpangan dalam pembangunan.

Ketimpangan merupakan permasalahan yang terjadi dalam proses pembangunan. Di Indonesia, ketimpangan pembangunan dapat berupa ketimpangan dari hasil pembangunan seperti pendapatan perkapita serta kegiatan dalam pembangunan seperti mobilitas modal dan tenaga kerja. Ketimpangan regional atau disebut juga ketimpangan wilayah dapat diartikan sebagai ketimpangan berupa pendapatan masyarakat antar wilayah maupun antar penduduk pada suatu wilayah (Dumairy, 1996a, p.59). Ketimpangan antar wilayah dapat diidentifikasi dengan meninjau perbedaan dari berbagai aspek seperti alokasi dana perbankan, penyerapan tenaga kerja, investasi serta pertumbuhan.

Indonesia bagian Timur merupakan wilayah dengan aset alam melimpah. Aset alam yang terdapat di Indonesia Timur tidak hanya meliputi panorama-panorama alam namun juga kekayaan lain seperti tambang, emas, gas, minyak bumi dan lainnya. Dengan kekayaan alam yang melimpah pembangunan di Indonesia bagian Timur dapat tumbuh apabila kekayaan tersebut dapat dioptimalisasi. Kemudian, pertumbuhan ekonomi di Indonesia bagian Timur setiap tahun mengalami peningkatan, dan peningkatan pertumbuhan ekonomi tersebut diharapkan mampu mendorong pemerataan pembangunan di wilayah Indonesia bagian Timur. Hal tersebut juga sesuai dengan tujuan dari pemerintah bahwa dalam rangka pemerataan pembangunan, maka pembangunan tersebut juga harus fokus di wilayah Indonesia bagian Timur (Paath, 2017).

Pembangunan difokuskan di wilayah Indonesia bagian Timur merupakan misi dari pemerintah. Hal tersebut dikarenakan berdasarkan data dari badan pusat statistik bahwa hingga September 2017, pulau Maluku dan Papua Barat berada pada

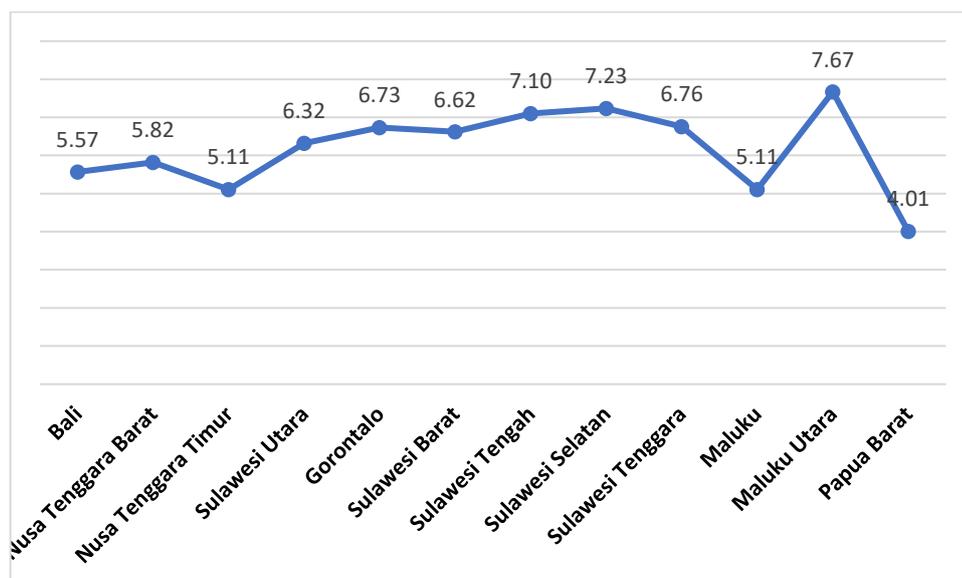
urutan teratas dilihat dari tingkat kemiskinan yakni sebesar 21,23% (Kusuma, 2018). Hal tersebut menunjukkan bahwa pemerataan belum tersebar secara menyeluruh yang berdampak pada tingginya ketimpangan wilayah di Indonesia bagian Timur. Hal tersebut juga dapat dilihat dari Indeks Williamson dibawah ini.



Gambar I.1
Indeks Williamson Indonesia bagian Timur 2017

Data Indeks Williamson diatas menunjukkan bahwa ketimpangan yang terjadi di Indonesia bagian Timur masih sangat tinggi dimulai dari Nusa Tenggara Timur dengan indeks paling tinggi sebesar 0.66. Berikutnya Sulawesi Selatan dengan angka indeks sebesar 0.61, Sulawesi Tengah dengan angka indeks sebesar 0.59, Nusa Tenggara Barat sebesar 0.58, Papua Barat 0.48, dan Sulawesi Utara 0.40. Berdasarkan data diatas bahwa ketimpangan merupakan masalah pembangunan yang sangat serius yang dapat menghambat pemerataan dalam pembangunan.

Proses pembangunan ekonomi berkaitan dan tidak terlepas dari pertumbuhan ekonomi. Tingginya pertumbuhan ekonomi pada suatu daerah akan mendorong tumbuhnya investasi ke daerah tersebut. Investasi pada suatu daerah diharapkan dapat menyerap tenaga kerja serta menurunkan angka pengangguran sehingga masyarakat akan semakin sejahtera. Pada tahun 2017, pertumbuhan ekonomi di Indonesia bagian Timur dari setiap tahun mengalami fluktuatif namun masih diatas pertumbuhan ekonomi nasional yang sebesar 5.07 persen kecuali Provinsi Papua Barat dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 4.01 persen yang masih dibawah nasional.



Gambar I.2
Pertumbuhan Ekonomi Indonesia bagian Timur 2017

PDRB untuk wilayah Indonesia bagian Timur pada tahun 2017 mengalami peningkatan dibandingkan pada tahun sebelumnya. PDRB menjadi salah satu indikator untuk melihat kondisi perekonomian pada suatu wilayah. Meningkatnya PDRB di Kawasan Indonesia bagian Timur menunjukkan bahwa perekonomian

Indonesia bagian Timur pada tahun 2017 mengalami pertumbuhan dari tahun sebelumnya.

Tabel I.1
PDRB ADHK 2010 Indonesia bagian Timur Tahun 2016- 2017

No.	Provinsi	PDRB (Milliar Rupiah)	
		2016	2017
1	Bali	137,192.52	144,964.20
2	Nusa Tenggara Barat	94,538	94,645
3	Nusa Tenggara Timur	59,705	62,788
4	Sulawesi Utara	74,771	79,495
5	Gorontalo	23,508	25,093
6	Sulawesi Barat	27,525	29,362
7	Sulawesi Tengah	91,053	97,552
8	Sulawesi Selatan	269,423	288,909
9	Sulawesi Tenggara	77,748	83,038
10	Maluku	26,284	27,812
11	Maluku Utara	21,557	23,211
12	Papua Barat	54,711	56,907

Sumber: BPS

Tujuan dari proses pembangunan ekonomi pada dasarnya untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk. Field menyatakan bahwa kesejahteraan dapat diukur dengan pertumbuhan ekonomi. Daerah dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan mendorong pusat kegiatan ekonomi, sehingga akan berdampak pada naiknya pendapatan masyarakat dan daerah. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi pada suatu wilayah dapat mendorong wilayah- wilayah disekitar untuk menggerakkan ekonominya sehingga akan menaikkan pertumbuhan ekonomi wilayah tersebut. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi pada suatu wilayah akan mendorong kegiatan ekonomi yang tinggi diikuti oleh wilayah lain sehingga akan

mendorong persaingan dalam kegiatan ekonomi yang akan berdampak pada perekonomian di Indonesia.

Investasi di Indonesia pada tahun 2017 baik investasi asing maupun dalam negeri mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Tahun 2017, penanaman modal asing yang terealisasi berdasarkan data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) tumbuh sebesar 10.6% sedangkan penanaman modal dalam negeri tumbuh sebesar 16.4% (BKPM RI, 2018). Tumbuhnya investasi di Indonesia menjadikan Indonesia berpotensi untuk menerima arus investasi lebih besar lagi. Tingginya investasi di Indonesia dapat mendorong proses pembangunan dalam hal ini pemerataan wilayah.

Pemerintah dalam rangka pemerataan pembangunan memfokuskan kegiatan investasi ke wilayah Indonesia bagian Timur. Hal tersebut untuk menciptakan ekonomi yang adil bagi seluruh wilayah Indonesia tidak hanya pada wilayah bagian barat saja. Investasi yang masuk ke wilayah Indonesia bagian Timur dalam hal ini penanaman modal asing meskipun mengalami fluktuatif namun cenderung tumbuh di wilayah Indonesia bagian Timur.

Pertumbuhan ekonomi yang ditunjukkan dengan PDRB dan penanaman modal asing yang tinggi di Indonesia bagian Timur, namun disertai dengan ketimpangan wilayah yang ditunjukkan dengan Indeks Williamson yang cenderung tinggi. Hal tersebut yang melatar belakangi peneliti untuk meneliti bagaimana pengaruh PDRB dan penanaman modal asing terhadap ketimpangan wilayah di Indonesia bagian Timur.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka masalah dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Pengaruh PDRB terhadap ketimpangan wilayah
2. Arus penanaman modal asing cenderung meningkat
3. Ketimpangan wilayah yang cenderung tinggi

C. Pembatasan Masalah

Dari berbagai latar belakang masalah yang telah diidentifikasi, maka penelitian ini difokuskan pada melihat mengapa ketimpangan wilayah di Indonesia bagian Timur masih tinggi disamping PDRB dan tingkat investasi yang tinggi. Maka penelitian ini berjudul “Pengaruh PDRB dan Penanaman Modal Asing terhadap Ketimpangan Wilayah di Indonesia bagian Timur tahun 2010- 2017”.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah diatas, maka dapat dirumuskan bahwa:

1. Bagaimana pengaruh PDRB terhadap ketimpangan wilayah di Indonesia bagian Timur?
2. Bagaimana pengaruh penanaman modal asing terhadap ketimpangan wilayah di Indonesia bagian Timur?

E. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dilaksanakannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoretis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai tambahan informasi dan ilmu pengetahuan tentang pengaruh PDRB dan penanaman modal asing terhadap ketimpangan wilayah di Indonesia bagian Timur.

2. Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis dari penelitian ini dapat memberikan saran dan masukan bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk merumuskan kebijakan dalam pembangunan di Indonesia bagian Timur guna meminimalkan tingkat ketimpangan wilayah di Indonesia bagian Timur dalam rangka pemerataan pembangunan yang menyeluruh.